

ABSTRAK

Ghifar Basarrudin. Npm. 17.81.0096. 2021. Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam MAB. Pembimbing 1. Dr. Sudiyono., S.H., M.H. Pembimbing 2. Ningrumi Ambarsari., S.H., M.H.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Sengketa Jaminan Fidusia

Apabila ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tidak dipenuhi, maka polisi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan perjalanan itu, melakukan pelanggaran sepanjang kontrak jaminan wali amanat mengikuti prosedur hukum. Jenis penelitian hukum preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonstruksi hukum sebagai system normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa fidusia dimana hak istimewa ini dimaksudkan untuk menegakkan kewajiban fidusia jika ditetapkan Komes Polri Nomor 8 Tahun 2011. Maka dengan ini menjamin cara yang aman, tertib, lancar dan bertanggung jawab. Peraturan ini membebaskan jaminan keamanan atas eksekusi aset amanah. Ini sering menjadi batu sandungan bagi perusahaan keuangan yang mempercayakan kontrak keuangan dan ingin kehilangan aset mereka jika gagal membayar. Peraturan Kapolri ini mengatur bahwa perusahaan pemberi pinjaman harus mengajukan permohonan jaminan penegakan hukum kepada Kapolda/Capolda setempat. Keterbatasan kepolisian dalam menangani sengketa pidana fidusia adalah Bareskrim menghadapi beberapa kendala dalam mengatasi praktik penyitaan kendaraan bermotor. Apa yang dilakukan penagih utang secara internal adalah karena kurangnya staf di departemen investigasi kriminal dan buruknya kualitas staf di kantor detektif. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakjelasan situasi anggota penagih utang, dan tidak adanya batasan yang jelas mengenai mekanisme kerja anggota penagih utang dalam menagih utang kepada kreditur.

ABSTRACT

Ghifar Basarrudin. Npm. 17.81.0096. 2021. The Role Of The Police In Fiduciary Security Dispute Settlement Based On Law Number 42 Of 1999 Concerning Warranties Fiducia. Thesis. Faculty of Law, MAB Islamic University. Advisor 1. Dr. Sudiyono., S.H., M.H. Advisor 2. Ningrumi Ambarsari., S.H., M.H.

Keywords: The Role of the Police, Fiduciary Guarantee Disputes

If the provisions contained in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees are not heeded, then the police who are authorized to process the course of the trip violate the unlawful act, provided that the fiduciary guarantee agreement is in accordance with the procedures of the law. In this study, using the type of normative legal research. Normative legal research is legal research that puts the law as a normative system building The results of this study indicate that the role of the Indonesian National Police in resolving fiduciary guarantee disputes, where in the case of the issuance of the National Police Chief Regulation Number 8 of 2011, this Perkap aims to carry out the execution of fiduciary guarantees in a safe, orderly, smooth, and accountable manner. This regulation provides security guarantees for every execution of fiduciary assets which is often an obstacle for finance companies that have fiduciary their financing contracts and want to confiscate their assets if they fail to pay. In this Regulation of the National Police Chief, it is stated that the finance company must submit an application for security of execution to the local police chief/Kapolda. The constraint of the Police in Handling Criminal Dispute Cases on Fiduciary Guarantees is that there are several obstacles faced by the Criminal Investigation Unit to overcome the practice of confiscation of motor vehicles. What is done by debt collectors is internally this is caused by the lack of personnel in the criminal investigation unit and the low quality of the personnel of the detective unit. Meanwhile, external factors are caused by the unclear status of debt collector members and there is no clear limit on the working mechanism of debt collectors in collecting creditors.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alberth, Donald Rumokoy dan Frans Maramis, (2014), Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman, (2014), Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa.
- Atmadjajaj, Djoko Imbawani , (2016), *Hukum Perdata*, Malang : Setara Press.
- Fuady, Munir , (2014), *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa.
- J, Satrio , (2000), *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamello, Tan, (2014), *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung : Alumni
- Marzuki, Peter Mahmud , (2005), Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana
- Mukti Fajar ND danYulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahardi, Pudi, (2007), *Hukum Kepolisian : Prefersionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Pertama, Surabaya : Laksbang Meditama.
- Rahman, Hasanudin , (1999), *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* , Bandung : Citra Aditya.
- Subekti, (2014), *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluhtujuh, Jakarta : Intermasa
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen , (2004), *Hukum Perdata : Hukum Benda* , Cetakan Ketujuh, Yogyakarta : Liberty.
- Shofie, Yusuf , (2000), *Perlindungan Hukum dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Tobing, Rudyanti Dorotea , (2017), *Hukum Lembaga Pembiayaan : Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Surabaya : LaksBang Pressindo.
- Yahman, (2016), *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana.

Yurizal, (2012), *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan Kelima, Malang : Media Nusa Creative.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Makalah :

Momo Kelana, (2002), *Reformasi Polri*, Makalah Seminar, Membangun Budaya Polisi Indonesia, Jakarta : Makalah seminar.

Internet :

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:07UvDpMGIScJ:https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/712/814+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=JAMINAN+FIDUSIA&btnG=